

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian, maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2008 dan 2009 realisasi penerimaan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan selisih persentase 0,032% dan 0,098%. Dan pada tahun 2010 dan 2011 realisasi penerimaan PBB Kota Bekasi sektor perkotaan dan pedesaan terjadi peningkatan dengan tercapainya target yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak dengan persentase 0,026% dan 0,089%.
- b. Masih terdapatnya SPPT yang bermasalah seperti salah nama, salah alamat, salah luas, kebesaran NJOP dan MK/Sengketa yang membuatnya menjadi beban target bagi kecamatan dan kelurahan di dalam mengamankan rencana penerimaan setiap tahunnya karena potensi yang di lapangan tidak real semuanya dapat tertagih.
- c. Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam mengamankan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan seperti Opsir dan pemberian hadiah bagi kecamatan atau kelurahan yang lunas PBB terlebih dahulu.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka dapat diajukan beberapa saran yang layak dipertimbangkan, yaitu:

- a. Harus lebih ditingkatkan Intensifikasi dari setiap pegawai dengan cara memberikan Pendidikan Sumber Daya Manusia, antara lain:
 - 1) Penataan Pajak Bumi dan Bangunan (*training*).
 - 2) Tugas belajar pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 3) Tugas belajar sistem komputerisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Melakukan kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, KPP Pratama Kota Bekasi, Kecamatan, Kelurahan, RW dan Wajib Pajak itu sendiri dalam mengatasi SPPT yang bermasalah seperti pendataan terhadap perubahan objek PBB.
- c. Untuk masalah *double anslag*, perlu ditetapkannya ketentuan dalam penentuan Nilai Objek Pajak yang sama pada Wajib Pajak.

